

Pembelajaran Politik Di Kampung Sungai Limau Kecamatan Pusako Kabupaten Siak

Surya Dailiati¹, Hernimawati², Sudaryanto³

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Lancang Kuning
Email: sudaryantofia@unilak.ac.id

Abstract

Kampung Sungai Limau is one of the villages located in the District of Pusako, Siak Regency, Riau Province. The village or Sungai Limau village has villagers who are generally engaged in animal husbandry and agriculture, such as oil palm, rubber and trees that can be utilized by their wood to meet the daily needs of the Sungai Limau Village community. In population data the level of education is dominated by high school graduates. Parents' attention to children's education is quite good, but more participation is needed from parents to support their children's education so they do not drop out of school. However, the level of awareness of Kampung Sungai Limau residents regarding politics is still lacking. This can be seen from the fact that there are still people who do not take general elections in the form of not using their voting rights.

The method of implementing community service is carried out by counseling and discussion, pre-test and post-test. Extension methods are carried out by giving explanations of material on Political Studies to Village officials, Community Empowerment Institutions, communities.

As a result, from the conditions it turned out that the participants did not understand all the indicators related to political learning. But this is already quite good because there are general indicators that are understood by participants such as political parties, legislative political and political development. This means that from 12 indicators, participants have understood 4 indicators and those that have not been understood are 8 indicators. Therefore the results of the pre test become basic knowledge in the next step which is to provide political learning in the form of counseling. The activity began with a prior discussion about the participants' knowledge of politics and the most striking in the village / village related to the role of the village head as executive and Village Consultative Body / BPD as the village legislature. After counseling and discussion the next step is to give a post test on community service activities, the initial question is given again as the pre test to participants on the knowledge of political learning and the result is an increase in understanding.

Keywords: Learning, Politics, Village

Abstrak

Kampung Sungai Limau adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kampung atau desa Sungai Limau memiliki penduduk desa yang umumnya bergerak di bidang peternakan dan pertanian, seperti tanaman kelapa sawit, karet dan pohon-pohon yang bisa dimanfaatkan kayunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Sungai Limau. Pada data kependudukan tingkat pendidikan di dominasi oleh lulusan SMA. Perhatian orang tua terhadap pendidikan anak sudah cukup baik, Namun tetap diperlukan peran serta yang lebih dari orang tua untuk mendukung pendidikan anaknya agar tidak putus sekolah. Namun, tingkat kesadaran warga Kampung Sungai Limau mengenai politik masih kurang. Ini dapat di lihat dari masih terdapatnya warga yang tidak mengikuti pemilihan umum dalam bentuk tidak menggunakan hak suaranya.

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan dan diskusi, pre test serta post test. Metode penyuluhan dilakukan dengan cara memberikan penjelasan materi tentang Studi Politik kepada aparatur Kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, masyarakat.

Hasilnya, dari kondisi ternyata peserta belum memahami semua indikator yang berhubungan dengan pembelajaran politik. Namun hal ini sudah cukup baik karena untuk indikator yang bersifat umum sudah ada yang dipahami oleh peserta seperti partai politik, pembangunan politik dan politik legislative. Artinya dari 12 indikator, peserta sudah memahami 4 indikator dan yang belum terpahami ada 8 indikator. Oleh karena itu hasil pre test menjadi pengetahuan dasar dalam langkah selanjutnya yakni memberikan pembelajaran politik dalam bentuk penyuluhan. Kegiatan dimulai dengan melakukan diskusi terlebih dahulu seputar pengetahuan peserta terhadap politik dan yang paling mengena di desa/ kampung berkaitan dengan peran kepala desa selaku eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa/ BPD selaku legislatif-nya desa. Setelah dilakukan penyuluhan dan diskusi langkah selanjutnya adalah memberikan post tes pada kegiatan pengabdian masyarakat, pertanyaan awal diberikan kembali sebagaimana pre test kepada peserta terhadap pengetahuan pembelajaran politik dan hasilnya terjadi peningkatan pemahaman.

Kata Kunci: *Pembelajaran, Politik, Kampung*

1. PENDAHULUAN

Kampung Sungai Limau adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kampung atau desa Sungai Limau memiliki penduduk desa yang umumnya bergerak di bidang peternakan dan pertanian, seperti tanaman kelapa sawit, karet dan pohon-pohon yang bisa dimanfaatkan kayunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Sungai Limau.

Pada data kependudukan tingkat pendidikan di dominasi oleh lulusan SMA. Perhatian orang tua terhadap pendidikan anak sudah cukup baik, Namun tetap diperlukan peran serta yang lebih dari orang tua untuk mendukung pendidikan anaknya agar tidak putus sekolah. Di Kampung Sungai Limau terdapat TK Harapan Bangsa, SD Negeri 002, SMP Negeri/MTs Swasta.

Namun, tingkat kesadaran warga Kampung Sungai Limau mengenai politik masih kurang. Ini dapat di lihat dari masih terdapatnya warga yang tidak mengikuti pemilihan umum dalam bentuk tidak menggunakan hak suaranya.

Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan masyarakat Sungai Limau yang merata dan melek politik tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata. Tugas pengembangan ini hendaknya dilakukan pula oleh seluruh masyarakat tidak terkecuali instansi-instansi dan perguruan tinggi khususnya dosen.

Dosen sebagai tenaga pendidik sekaligus manusia intelektual dalam masyarakat adalah salah satu pihak yang turut mengembangkan tugas untuk membangun bangsa. Sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, peran serta dosen dalam masyarakat tidak dibatasi pada kewajiban akademis dan lingkungan kampus saja melainkan juga vital pada berbagai fungsi lain di lapangan. Seiring dengan semakin dekatnya pemilihan umum 2019 (pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi/ Kabupaten / Kota serta DPD RI dan Presiden/ Wakil Presiden) dosen dituntut untuk secara kritis mampu terlibat lebih aktif dalam upaya pembangunan politik, melalui proses belajar dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diiringi pula dengan kerja nyata di lingkungan, pengabdian dosen di bidang pembangunan masyarakat ini dapat dimulai sejak dini melalui berbagai bentuk aplikasi karya dan bakti.

2. METODE

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan dan diskusi, pre test serta post test. Metode penyuluhan dilakukan dengan cara memberikan penjelasan materi tentang Studi Politik:

1. Aparatur Kampung
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
3. Masyarakat

Keseluruhan unsur – unsur kelembagaan di tingkat kampung/ kelurahan tersebut, akan diberikan informasi dan pengetahuannya di dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam melakukan kegiatan pembangunan yang berdasarkan politik.

Disamping itu juga diberikan materi yang berhubungan dengan sifat dan ruang lingkup ilmu politik, sifat negara, bentuk-bentuk pemerintahan. Dalam hal lain juga di berikan pemahaman pengetahuan tentang hukum dan pemerintahan, ideologi politik.

Metode diskusi yaitu dilakukan setelah metode penyuluhan dan penjelasan diberikan dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada para peserta pengabdian untuk bertanya jawab dan memecahkan persoalan – persoalan masyarakat di dalam kegiatannya secara ke organisasian masing – masing.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pre Test

Kegiatan pengabdian masyarakat dimulai dengan memberikan pre test kepada peserta terhadap pengetahuan politik tentang filsafat politik, peradilan hukum, proses eksekutif, organisasi dan tingkah laku administrative, politik legislative, partai politik dan kelompok kepentingan, pemungutan suara dan pendapat umum, sosialisasi politik dan kebudayaan politik. Untuk hal ini banyak yang belum memahami. Kemudian perbandingan politik, pembangunan politik politik dan organisasi internasional, serta teori dan metodologi ilmu politik sudah cukup memahami.

Dari kondisi ternyata peserta belum memahami semua indicator yang berhubungan dengan pembelajaran politik. Namun hal ini sudah cukup baik karena untuk indicator yang bersifat umum sudah ada yang dipahami oleh peserta seperti partai politik, pembangunan politik dan politik legislative. Artinya dari 12 indikator, peserta sudah memahami 4 indikator dan yang belum terpahami ada 8 indikator. Oleh karena itu hasil pre test menjadi pengetahuan dasar dalam langkah selanjutnya yakni memberikan pembelajaran politik dalam bentuk penyuluhan. Kegiatan dimulai dengan melakukan diskusi terlebih dahulu seputar pengetahuan peserta terhadap politik dan yang paling mengena di desa/ kampung berkaitan dengan peran kepala desa selaku eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa/ BPD selaku legislatif-nya desa.

Penyuluhan

1. Filsafat politik

Filsafat Politik adalah cabang ilmu dari filsafat yang mempelajari tema-tema seperti politik, kebebasan, keadilan, hak milik, hak, hukum, pemerintahan, dan penegakan hukum oleh otoritas. Beberapa pertanyaan utama dalam ilmu filsafat politik antara lain adalah; apa yang melegitimasi otoritas suatu pemerintahan, hak-hak dan kebebasan apa saja yang dimiliki warga negara dan harus dilindungi oleh pemerintah, dan apa saja tugas warga negara dalam pemerintahan. Beberapa filsuf dalam bidang filsafat politik yang penting pada era modern adalah Thomas Hobbes, Machiavelli, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, John Rawls, Jurgen Habermas.

2. Peradilan hukum dan proses

Perdebatan mengenai hubungan hukum dan politik memiliki akar sejarah panjang dalam ilmu hukum. Bagi kalangan penganut aliran positivisme hukum seperti John Austin, hukum adalah tidak lain dari produk politik atau kekuasaan. Pada sisi lain, pandangan berbeda datang dari kalangan aliran sejarah dalam ilmu hukum, yang melihat hukum tidak dari dogmatika hukum dan undang-undang semata, akan tetapi dari kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan berpandangan bahwa hukum itu tergantung pada penerimaan umum dalam masyarakat dan setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup.

3. Proses eksekutif

Eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Contoh paling umum dalam sebuah cabang eksekutif disebut ketua pemerintahan. Eksekutif dapat merujuk kepada administrasi, dalam sistem presiden, atau sebagai pemerintah, dalam sistem parlementer. Prosesnya tentu ada yang bersifat *top down* (dari pemerintah ke masyarakat) dan ada juga yang *bottom up* (dari masyarakat kepada pemerintah).

4. Organisasi dan tingkah laku administratif

Perilaku administrasi tidak dapat dilepaskan dari organisasi sebagai satu kesatuan. Dengan demikian perilaku administrasi berpengaruh pada perkembangan dan kemajuan organisasi. Perilaku administrasi yang efektif dan efisien akan berpengaruh pada dinamika organisasi dalam mewujudkan tugas-tugas pokoknya. Perilaku administrasi memerlukan partisipasi dan keikutsertaan orang lain di dalam suatu organisasi, tanpa keikutsertaan orang lain sebagai respon berarti tidak terjadi kegiatan pengendalian kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manusia merupakan faktor utama dalam administrasi, karena manusia yang mengendalikan dan manusia yang dikendalikan.

5. Politik legislative

Legislatif adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu *parlemen*, *kongres*, dan *asembli nasional*. Dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Dalam Sistem Presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan *budget* dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga kadangkala menulis perjanjian dan memutuskan perang.

6. Partai politik dan kelompok kepentingan

Kelompok kepentingan ialah sarana yang digunakan sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama dan secara bersama-sama menyampaikan kepentingan mereka kepada pemerintah. Kepentingan tersebut dapat berupa kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, nilai-nilai, dan harapan-harapan – yang bisa terpenuhi, akan tetapi bisa juga dikecewakan oleh tindakan-tindakan pemerintah. Seseorang ataupun sekelompok orang bisa pula diuntungkan akan tetapi bisa dirugikan oleh tindakan atau keputusan tersebut. Oleh karena itu warga negara sangat memperhatikan dan berkepentingan dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Mereka menyatakan atau mengartikulasikan kepentingan mereka kepada lembaga-lembaga politik dan pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama dengan orang lain yang memiliki kepentingan yang sama.

7. Pemungutan suara dan pendapat umum

Salah satu di antara elemen dan indikator yang paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pemilu, khususnya dalam hal pengawasan atau pemantauan proses pemilu. Peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi atau memantau jalannya proses kontestasi demokrasi merupakan hal yang sangat penting.

8. Sosialisasi politik dan kebudayaan politik

Budaya politik dan sosialisasi politik adalah pendekatan yang cukup akhir di dalam ilmu politik. Pendekatan ini lahir setelah tuntasnya penelitian yang dilakukan oleh dua peneliti Amerika Serikat yaitu Gabriel A. Almond dan Sydney Verba. Hasil penelitian tersebut dituangkan di dalam buku mereka *Budaya Politik*, yang merupakan hasil kajian antara tahun 1969 sampai dengan 1970 atas 5000 responden yang tersebar di 5 negara: Amerika Serikat, Inggris, Italia, Meksiko, dan Jerman Barat.

Budaya politik berarti kecenderungan berperilaku individu terhadap sistem politik yang berlaku di negaranya. Dalam pendekatan budaya politik, individu merupakan subyek kajian yang utama dan bersifat empiris, dalam arti pendapat orang per oranglah yang membangun kesimpulan penelitian. Ini berbeda dengan pendekatan filsafat politik, misalnya, yang lebih bersifat abstrak oleh sebab pendapat dibangun oleh seseorang tanpa terlebih dahulu melihat fakta lapangan, atau paling tidak, melalui serangkaian penelitian yang melibatkan orang banyak.

Sementara itu, sosialisasi politik merupakan instrumen yang berupaya melestarikan sebuah sistem politik. Melalui serangkaian mekanisme dalam sosialisasi politik, individu dari generasi

selanjutnya dididik untuk memahami apa, bagaimana, dan untuk apa sistem politik yang berlangsung di negaranya masing-masing berfungsi untuk diri mereka.

9. Perbandingan politik

Politik komparatif atau perbandingan politik adalah suatu bidang dalam ilmu politik, yang ditandai dengan pendekatan empiris berdasarkan *metode komparatif*. Dengan kata lain, perbandingan politik adalah studi mengenai politik dalam negeri, lembaga-lembaga politik, dan konflik dalam negara. Hal ini sering melibatkan perbandingan antara negara-negara dan antarwaktu dalam satu negara, dengan penekanan dalam pola kesamaan dan perbedaan. Arend Lijphart berpendapat bahwa perbandingan politik tidak memiliki *substantif* fokus dalam dirinya sendiri, melainkan fokus *metodologis*. : yakni yang berfokus pada " *bagaimana*."

10. Pembangunan politik

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman tentang pembangunan politik yang mencakup variabel demokrasi, governance, dan supremasi hukum. Pembangunan politik ditandai dengan proses perubahan sosial, khususnya dalam sistem politik. Namun perubahan sosial tidak bisa disebut sebagai pembangunan politik.

Menurut Gabriel Almond, pembangunan politik adalah upaya mengembangkan kapasitas-kapasitas sistem politik dengan menggunakan pendekatan pembangunan. Tujuannya adalah agar sistem politik mampu memelihara dirinya sendiri.

Pembangunan politik mencakup rentang persoalan dan tema yang luas, yaitu budaya politik, sosialisasi politik, partai politik, stabilitas politik, nasionalisme, institusionalisasi politik, pembangunan administrasi, hukum, demokrasi, dan sebagainya, sehingga pembangunan politik dirumuskannya sebagai suatu proses perubahan yang multidimensional, tetapi semuanya dirumuskan secara etnosentris.

11. Politik dan organisasi internasional

Peranan Organisasi Internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara, kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama.

Kemudian peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam orisi sosialnya. Dengan peranan tersebut, para pelaku individu atau organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang maupun lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau konsep lingkungan dengan hubungan dan pola yang menyusun struktur social.

12. Teori dan metodologi ilmu politik

Metode penelitian yang digunakan dalam ilmu politik meliputi metode induksi dan deduksi. Metode induksi adalah serangkaian strategi ataupun prosedur penarikan kesimpulan umum yang diperoleh berdasarkan proses pemikiran setelah mengkaji peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus atas dasar fakta teoritis yang khusus ke yang umum. Biasanya penggunaan metode induksi lebih banyak digunakan dalam penelitian kualitatif.

Post Test

Setelah dilakukan penyuluhan dan diskusi langkah selanjutnya adalah memberikan post tes pada kegiatan pengabdian masyarakat, pertanyaan awal diberikan kembali sebagaimana pre test kepada peserta terhadap pengetahuan pembelajaran politik, hasilnya peserta sudah memahami materi yang disampaikan.

Artinya, setelah dilakukan penyuluhan terjadi peningkatan pemahaman dan pengetahuan peserta untuk seluruh indicator. Dengan demikian kegiatan pengabdian masyarakat tentang pembelajaran politik sudah memberikan dampak positif bagi kehidupan social masyarakat khususnya dari segi politik. Selain itu peserta juga merasa lebih yakin dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) kedepan untuk memberikan suaranya.

Luaran Yang Dicapai

Adapun luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Sungai Limau Kecamatan Pusako Kabupaten Siak adalah dalam bentuk jurnal, pemberitaan di media cetak, elektronik dan social, peningkatan kualitas kerja, pendampingan, peningkatan pemahaman dan bahan perkuliahan.

Luaran dari kegiatan pengabdian ini diterbitkan dalam jurnal *Dinamisia Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lancang Kuning (LPPM) Unilak*. Jurnal ini terbit setiap semester dan menjadi bahan dokumentasi bago peneliti dan pihak lainnya.

Sedangkan untuk publikasi dilakukan di media elektronik yakni www.fia.unilak.ac.id. Dengan publikasi online ini, maka semua pihak dapat menerima informasi akademis yang dilakukan oleh tenaga pengajar FIA Unilak dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi.

4. KESIMPULAN

Dari pengabdian yang dilakukan diperoleh kesimpulan;

1. Sebelum dilakukan pengabdian masyarakat, pemahaman dan pengetahuan masyarakat Kampung Sungai Limau Kecamatan Pusako terhadap pembelajaran politik masih rendah. Setelah dilakukan pengabdian masyarakat, terjadi peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat.
2. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak masih kurang dalam memberikan pembelajaran politik.

5. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan;

1. Mendorong masyarakat untuk berinisiatif meningkatkan pengetahuannya melalui media cetak, elektronik maupun media sosial.
2. Perlu kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) guna memberikan pembelajaran politik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan bantuan dana dan lain sebagainya atas kegiatan pengabdian yang dilakukan. Selanjutnya, juga kepada Pemerintahan Kampung Sungai Limau Kecamatan Pusako Kabupaten Sik yang bersedia menjasi mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dicky Wisnu UR, 2009, *Teori Organisasi*, Universitas Muhamadiyah Malang
- Fatah Yasin Ahmad, 2011, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, UIN-MALIKI PRESS, Malang
- Haw. Widjaja, 2013, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Inu Kencana, 2013, *Sistem Administrasi Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila, Paradigma Yogyakarta*.
- Khaerul Umam ,2010, *Perilaku Organisasi*, CV. Pustaka Setia, Jakarta.
- Miftah Toha, 2010, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Kencana Prenada Grup, Jakarta.
- Padmo dan Nazaruddin, 2011, *Pengantar Ilmu Politik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa
- Soesilo Zauhar, 2012, *Reformasi Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sofyan Safri Harahap, *Sistim Pengawasan Manajemen*, cetakan ke 2 PT. Pustaka Kuantum , Jakarta 2010.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*, Jakarta : Penerbit Alfabetha
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Administratif*, Alfabeta, Bandung.
- Sutarto, *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*, Gajah Mada University, 2010.
- Terry, George R. Dan Leslie W. Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa